



**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke)**

**Maria Suryaningsih, Maruf Hidayat
STIE Muhammadiyah Jakarta
(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)**

Abstract

This study raises the issue of non-uniformity in the application of accrual-based government accounting standards in government institutions, therefore this study aims to determine the accrual-based government accounting standards for the quality of financial statements. The dependent variable in this study is the quality of financial statements, while the independent variable in this study is the accrual-based government accounting standards. The number of samples in this study were 75 respondents, which were determined using the Slovin formula. The research method used is a quantitative method of data analysis techniques that uses simple linear regression analysis and hypothesis testing using t test. The results showed that the application of accrual-based government accounting standards had a positive and significant effect on the quality of financial statements. Research Results Said to be influential because accrual-based government accounting standards as measured by several indicators have a positive and significant effect. Accrual-based government accounting standards are said to be good because most accrual-based government accounting standards have been applied and implemented according to their operational functions and standards.

Keywords: Accrual Based Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketidakseragaman dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Lembaga lembaga pemerintahan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75 responden, yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linear sederhana dan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil Penelitian Dikatakan berpengaruh karena standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diukur oleh beberapa indikator memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dikatakan baik karena

sebagian besar standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah diterapkan dan dijalankan sesuai fungsi dan standar operasionalnya.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

Kementerian yang berperan utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan membawahi beberapa Direktorat Jenderal dan Badan. Salah satu Direktorat Jenderal yang menjalankan fungsi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJPb mendekan wewenangnya di daerah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

Tugas pokok KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPN menyalurkan APBN yang telah disusun oleh pemerintah pusat dengan cara melakukan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Satuan Kerja (Satker) yang telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jika KPPN menyetujui SPM

tersebut, maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Atas dasar SP2D tersebut kantor pusat DJPb melalui bank operasional yang ditunjuk akan mengirimkan dana yang diminta ke rekening yang tertera dalam SPM. sebagai satuan kerja telah menunjukkan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini terlihat dari komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Semester I dan Semester II TA 2018, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk dapat menghasilkan laporan-laporan tersebut, KPPN Merauke telah menggunakan aplikasi komputer yang terintegrasi dengan aplikasi komputer lainnya yang sudah dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan tonggak awal reformasi di bidang Keuangan Negara dan pada akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri dalam mengatur Keuangan Negara. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Sebelum Undang-Undang tersebut terbit, pemerintah Indonesia memakai Undang-Undang peninggalan Belanda.

Penelitian ini diangkat kembali karena adanya research gap sebagai berikut: Penelitian terdahulu yang dilakukan *Ihwan Kema (2013)* menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado dalam penyajian laporan keuangannya belum mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Penelitian lain yang dilakukan *Andi Faradillah (2013)* menyimpulkan bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam mplementasi SAP berbasis akrual.

Penulis berpendapat bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penting dalam pengelolaan keuangan negara.

II. KAJIAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu: "Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pem-

biayaan berbasis akrual, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual."

Menurut Suwanda dan Santosa (2015: 37) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Menurut Elsye d.k.k. (2016:32) SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan APBD.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut *Indra Bastian (2010:138)* tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah "Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah".

Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Elsye d.k.k. (2016:34) Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yaitu: Teknologi Informasi Penggunaan tek-

nologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data

Indikator Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual

Adapun indikator Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menurut *Elsye d.k.k. (2016:34)* yaitu: “Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, Teknologi informasi, Sistem akuntansi sesuai SAP”.

Jurnal dan Buku Besar pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat menyebutkan: “Transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber kemudian dicatat ke dalam akun dalam bentuk jurnal. Selanjutnya, jurnal tersebut dipindahbukukan ke dalam buku besar.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut *Fahmi (2016:2)* Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Menurut *Thomas (2013:35)*, pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu membuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu.”

Komponen Laporan Keuangan

Menurut *Erlina d.k.k. (2015:23)* komponen laporan keuangan pemerintah adalah: Laporan Realisasi Anggaran. Merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Berguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan

Menurut *Faud (2015:67)* secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- ✓ Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah.
- ✓ Menyediakan informasi alokasi, sumber, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Manfaat Laporan Keuangan Pemerintahan

Menurut Erlina d.k.k. (2016:21) Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

✓ Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

✓ Manajemen

Membantu para pengguna untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (memandang fenomena atau gejala itu dapat diklasifikasikan, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat), digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, Dalam pengujian deskriptif terdapat pengujian nilai *mean*, *median*, *modus*, *quartil*, *varians*, *standar deviasi*, dan berbagai macam bentuk diagram. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independen

Menurut *Sugiyono* (2017:39) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X).

2. Variabel dependen

Menurut *Sugiyono* (2017:39) variabel dependen (variabel terikat) merupakan varia-

bel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y). Tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Pertanyaan	Sumber Referensi
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	1. Sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.	PP No. 71 Tahun 2010
	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (<i>mainframe, mini, micro</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), <i>database</i> , jaringan (<i>internet</i> dan <i>intranet</i>), <i>electronic commerce</i> , dan jenis lainnya yang berhubungan dengan Teknologi	1. Teknologi Informasi (Aplikasi) 2. Sistem akuntansi sesuai SAP. 3. Laporan keuangan terkomputerasi. 4. Software sesuai dengan UU.	Wilkinson <i>et. al.</i> (2000)
	Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.	1. SDM Pelaksana (operator aplikasi) memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kualitas keuangan dalam suatu entitas.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	IAI (2012:5), PP No. 71 Tahun 2010

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (*Sugiyono, 2017:80*). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan pada 91 satker di wilayah pembayaran KPPN Merauke.

Teknik Penentuan Sampel

Menurut *Sugiyono (2017:81)*, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Menurut *Sugiyono (2017:84)* *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota atau populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penentuan sampel biasanya digunakan rumus Slovin, yaitu $n = N/(1+Ne^2)$ dengan n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, dan e = taraf kesalahan. Dengan menggunakan $e = 5\%$, dari rumus tersebut diperoleh jumlah sampel 75 sampel.

Menurut *Ghozali (2016:19)* statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Metode Analisis Data

Menurut *Sugiyono (2017:147)* analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis respon, mentabulasi data

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Setelah itu dilakukan teknik pengujian dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Program Social Science (SPSS) for windows* untuk memudahkan proses pengolahan data yang telah terkumpul.

IV. HASIL PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan pada satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan satker. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis Kelamin	Frekuensi	Percentase (%)
Perempuan	30	40
Laki-Laki	45	60
Total	75	100

Sumber: Kuesioner Penelitian

Tabel 4 menjelaskan bahwa klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden laki-laki dengan jumlah 45 responden atau 60% dari total keseluruhan responden. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 30 responden atau 40% dari keseluruhan responden.

b. Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase (%)
20-30	20	26,67
31-40	41	54,67
41-50	12	16
51-59	2	2,66
Total	75	100

Tabel 5 menjelaskan bahwa dari segi umur mayoritas responden yaitu 54,67% atau sejumlah 41 responden berumur 31-40 tahun.

Terdapat 26,67% atau sejumlah 20 responden berumur 20-30 tahun. Sedangkan responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 16% atau 12 responden. Sisanya adalah responden berumur 51-59 tahun sebanyak 2,66% atau 2 responden.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SMA/Sederajat	26	34,67
D3	9	12
S1	38	50,67
S2	1	1,33
Lainnya	1	1,33
Total	75	100

Sumber: Kuesioner Penelitian

Item Pelayanan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah Skor Aktual	Indeks
	SS	S	N	TS	STS		
X1	48	27	0	0	0	75	348
X2	48	27	0	0	0	75	348
X3	49	25	1	0	0	75	348
X4	49	26	0	0	0	75	349
X5	47	27	1	0	0	75	346
X6	50	24	1	0	0	75	349
X7	33	35	7	0	0	75	326
X8	42	33	0	0	0	75	342
X9	56	17	2	0	0	75	354
X10	42	30	3	0	0	75	339
X11	53	22	0	0	0	75	353
X12	54	21	0	0	0	75	354
X13	34	37	4	0	0	75	330
X14	18	50	7	0	0	75	311
X15	25	45	5	0	0	75	320
TOTAL SKOR DICAPAI						5117	

Sumber: Kuesioner penelitian

Tabel 6 menjelaskan mayoritas responden adalah lulusan S1 sebesar 50,67% atau sebanyak 38 responden. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan D3 sebesar 12% atau sebanyak 9 responden. Sisanya yaitu 26 responden atau 34,67% responden

merupakan lulusan SMA/sederajat, 1 responden atau 1,33% responden lulusan S2, dan 1 responden atau 1,33% responden lulusan lainnya. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7

Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Percentase (%)
1-5 tahun	12	16
5-10 tahun	43	57,33
> 10 tahun	20	26,67
Total	75	100

Tabel 7 menjelaskan mayoritas responden yaitu 57,33% atau sebanyak 43 orang telah bekerja selama 5-10 tahun. Sedangkan 26,67% responden atau sebanyak 20 responden telah bekerja lebih dari 10 tahun. Sisanya yaitu 16% responden atau sebanyak 12 responden baru bekerja selama 1-5 tahun.

Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

Untuk memudahkan penelitian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penelitian sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	: diberi bobot5
Setuju (S)	: diberi bobot4
Netral (N)	: diberi bobot3
Tidak Setuju (TS)	: diberi bobot2

Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1

Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responen

No.	Jumlah Skor	Kriteria
1	0,00%-19%	Tidak Baik
2	20% - 39%	Kurang Baik
3	40% - 59%	Cukup
4	60% - 79%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2017:138)

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pernyataan x n = 5 x 15 x 75 = 5625

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pernyataan x n = 1 x 15 x 75

= 1125 Persentase skor

= (5117:5625) x100%

= 90,97% dibulatkan menjadi 91%

Gambar 2 Garis Kontinum Variabel

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual (X).



Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Berbasis Akrual

di satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke termasuk dalam kategori sangat baik.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengujian uji-t yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 10,782 > 1,993. Selain itu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000. Artinya semakin meningkat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Selain itu, hasil uji koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,784 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Hasil uji koefisien determinasi pun sejalan dengan hasil uji yang lain, di mana nilai koefisien determinasi didapat angka 61,4% yang berarti bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memberikan pengaruh sebesar 61,4% atas kualitas laporan keuangan.

Dikatakan berpengaruh karena standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang

diukur oleh beberapa indikator memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dikatakan baik karena sebagian besar standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah diterapkan dan dijalankan sesuai fungsi dan standar operasionalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Adhi dan *Suhardjo (2013)*, Yusup Komarudin (2013), *Rukmi Juwita (2013)*, dan *Aditya Sanjaya (2017)* di mana dalam penelitian-penelitian tersebut disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara (KPPN) Merauke), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pengujian analisis deskriptif pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan:

- Satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke sudah melaksanakan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010 dengan sangat baik.

- Kualitas laporan keuangan pada satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke sudah sangat baik berdasarkan penilaian indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke.

Hasil penelitian ini menjadi bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada satker-satker wilayah pembayaran KPPN Merauke sebagaimana PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.

Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (175-185)

Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni. 2013. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Andi. Yogyakarta.

Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi* Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

A. Muri Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Agus Haryanto. 2012. *Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi. Dharma Ekonomi*. No. 36

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.